

Rhiza S. Sadjad
NIM 045276176

Pertanyaan:

Jawaban:



Kami tinggal di Kota Bogor, Jawa Barat. Terkait dengan Kota Bogor, kami pernah menulis opini berjudul “*Dua Pilihan Masa Depan Kota Bogor*” yang dimuat di harian RADAR BOGOR, 2 Januari 2025, hal. 3. Tulisan singkat terlampir adalah penulisan ulang dari artikel tersebut, disesuaikan dengan pertanyaan **TUGAS 1** dalam matakuliah **IPEM4427.14/Sosiologi Pemerintahan 14** ini. Fokus pembahasan diarahkan pada masalah struktur pemerintahan kota pada saat ini, dan kemungkinan perubahan pada masa depan.

Dua Pilihan Struktur Pemerintahan Masa Depan Kota Bogor

Rhiza S. Sadjad

Mahasiswa Program Studi S1 Sosiologi Universitas Terbuka

Kota Bogor sudah berdiri sebagai kota sejak ratusan tahun lalu. Menurut catatan sejarah (**Ref. [3]**), Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran dinobatkan sebagai raja Kerajaan Sunda di ibukotanya yang konon lokasinya ada di kawasan Bogor sekarang, pada tanggal 3 Juni 1482. Tanggal ini sampai sekarang diperingati sebagai “hari ulangtahun” Kota Bogor. Sedangkan sebagai kota modern, lengkap dengan balai kota dan aparat pamongpraja sebagai suatu struktur pemerintahan kota, didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan nama *Buitenzorg* pada tahun 1922, lebih seratus tahun lalu. Setelah kemerdekaan, nama Kota Bogor dikembalikan seperti semula, pada tahun 1949.

Menurut Modul 03 (**Ref. [1]**, hal. 3.15 – 3.27), dengan mengambil pendekatan struktural-fungsionalisme, struktur pemerintahan dibentuk sesuai dengan fungsinya, yaitu utamanya fungsi pelayanan (*government services*), pembangunan (*development*) dan pemberdayaan (*empowerment*). Dalam ini ada dua pola “3F” yang bisa digunakan, yaitu pola “*Forms Follow Functions*” (bentuk mengikuti fungsi) atau pola “*Functions Follow Forms*” (fungsi mengikuti bentuk). Sebagai kota lama, untuk pemerintahan Kota Bogor yang secara fungsional sudah berjalan sebelum ada regulasi (per-undang-undang-an dan peraturan) terkait pemerintahan daerah, maka pola “*Forms Follow Functions*” (bentuk mengikuti fungsi) tentu lebih sesuai. Jadi struktur aparat pemerintahan bisa dibentuk sesuai dengan fungsinya, baru kemudian diselaraskan dengan regulasi yang ada. Saat ini, Kota Bogor dijadikan sebagai ibukota (selama setahun) dari Provinsi Jawa Barat, sehingga Kantor Gubernur dipindahkan oleh Gubernur Jawa Barat, *Kang Dedi Mulyadi* atau KDM, dari Kota Bandung ke Kota Bogor, dengan menempati gedung bekas Kantor Keresidenan Bogor.

Pada saat ini Kota Bogor berada di persimpangan jalan. Sebagai konsekuensi dari hilangnya kawasan pedesaan di sekitar kota Bogor (**Ref. [2]**), Bogor saat ini tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari kota megapolitan (**Ref. [4]**) Jabodetabek. Tapi sebenarnya ada alternatif lain. Bogor bisa juga direncanakan menjadi ibukota provinsi baru hasil pemekaran, yaitu provinsi Bogor Raya, yang meliputi wilayah eks-Keresidenan Bogor (kabupaten/kota Bogor, Sukabumi dan Cianjur), ditambah sebagian kecil wilayah Karawang, Bekasi dan Tangerang. Tidak seperti wilayah pedesaan yang bisa dibiarkan tumbuh dan berkembang (atau mati) secara alami, wilayah perkotaan harus dikembangkan dengan pengkajian dan perencanaan yang matang dan seksama, mengikuti kaidah-kaidah baku perencanaan kawasan perkotaan, supaya tidak menjadi kumuh, centang-perenang dan kacau-balau. Oleh karena itu, kota dan kabupaten Bogor mestilah jelas visinya: apakah akan tetap

dibiarkan menjadi bagian dari kota megapolitan Jabodetabek (yang selanjutnya kita sebut sebagai opsi 1), atau menjadi ibukota provinsi Bogor Raya (disebut opsi 2)? Pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh kepala-kepala daerah yang baru terpilih di wilayah Jabodetabek, serta wilayah Jawa Barat pada umumnya, yang juga merupakan tantangan besar bagi warga masyarakat Bogor pada khususnya.

Opsi 1 dan opsi 2 masing-masing tentu ada kelebihan dan kekurangannya, ada kekuatan dan kelemahannya, serta memiliki berbagai tantangan dan peluang. Mungkin bisa diusulkan agar dibentuk 2 (dua) gugus-tugas. Gugus-tugas A dibentuk oleh pemerintah provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk mengkaji gagasan menjadikan kawasan Jabodetabek menjadi suatu kota megapolitan dengan sistem pemerintahan dan pengelolaan yang sama sekali baru. Sedangkan gugus-tugas B dibentuk bersama oleh pemerintah kota dan kabupaten Bogor untuk mengkaji kelayakan pembentukan provinsi Bogor Raya sebagai pemekaran dari provinsi Jawa Barat. Kedua gugus-tugas bekerja bersamaan secara paralel dan independen satu sama lain, untuk menghasilkan proposal berdasarkan kajian masing-masing. Nantinya salah satu dari kedua proposal itu akan dipilih oleh para pemangku kepentingan yang terdiri dari paling sedikit unsur-unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, parlemen pusat dan daerah, para pebisnis dan pemilik modal, para pakar dan akademisi serta warga masyarakat terkait. Untuk menghasilkan keputusan yang amat penting dan strategis bagi masa depan wilayah Bogor khususnya, dan kawasan Jabodetabek pada umumnya itu, diperlukan partisipasi aktif dari segenap warga masyarakat. Jika perlu bisa dilaksanakan referendum untuk menentukan pilihan opsi 1 atau opsi 2.

Gugus-tugas A dan B masing-masing terdiri para pakar dan praktisi, paling sedikit terdiri dari pakar dan praktisi dalam bidang ilmu pemerintahan, ilmu perencanaan kota, sosiologi perkotaan dan sosiologi pedesaan, serta ekonomi makro dan ekonomi mikro, yang biasa dan bersedia untuk bekerja menyusun hasil kajian berdasarkan analisis teori dan data, bukan sekedar berdasarkan opini atau intuisi. Kajian harus bersifat komprehensif, menyangkut berbagai dampak jangka panjang dalam bidang ekonomi (misalnya penciptaan lapangan kerja, perdagangan dan penanaman modal), infrastruktur sistem pemerintahan, sarana-prasarana fisik, keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup serta pewarisan budaya. Hasil kajian harus dengan jelas memperlihatkan bagaimana opsi 1 atau opsi 2 yang diambil akan meningkatkan *livability* atau kelayakan sebagai tempat tinggal dan mencari nafkah bagi seluruh warga masyarakat tanpa harus ada yang tersingkir atau digusur.

Kedua gugus tugas pertama-tama harus menyusun perkiraan awal dari analisis biaya dan keuntungan, baik yang tampak maupun tidak tampak, dari masing-masing opsi yang dikajinya. Perkiraan awal ini nantinya akan terus di-koreksi berdasarkan kajian dari masing-masing opsi yang

dipilih. Misalnya untuk opsi 1, yaitu bergabung dengan megapolitan Jabodetabek yang dikaji oleh gugus-tugas A, keuntungannya secara umum akan memperluas akses warga masyarakat Bogor ke sarana-prasarana, lapangan pekerjaan dan berbagai sumber-daya melalui inter-konektivitas dan integrasi dengan wilayah-wilayah lain se-Jabodetabek. Sedangkan untuk opsi 2, yaitu menjadi ibukota provinsi Bogor Raya yang dikaji oleh gugus-tugas B, keuntungannya misalnya akan memperbesar otonomi bagi pemerintah daerah kota Bogor untuk merancang pembangunan wilayahnya sendiri tanpa bergantung pada wilayah lain, sehingga terlestarikan jati-dirinya sebagai warisan sejarah masa lalu, untuk diteruskan ke generasi yang akan datang.

Berdasarkan hasil kajian masing-masing gugus-tugas, bisa disusun model yang komprehensif dari pengembangan kota Bogor, baik jika dipilih opsi 1 mau pun jika dipilih opsi 2. Setelah diperoleh modelnya, maka selanjutnya dapat digunakan berbagai paket perangkat-lunak yang tersedia, seperti *ArcGIS*, *QGIS*, *iTree*, *NetLogo*, dan yang populer misalnya *UrbanSim*, untuk membuat simulasi dari pengembangan kota Bogor sampai jauh ke depan, misalnya sampai tahun 2045, ketika “*Indonesia Emas*” yang dicita-citakan kelak terwujud. Setelah jelas tergambarkan secara realistis dengan simulasi tersebut, bagaimana kiranya wujud masa-depan kota Bogor, baik jika dipilih opsi 1 mau pun opsi 2, barulah dilaksanakan proses pengambilan keputusan yang demokratis, yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan partisipasi aktif seluruh warga masyarakat kota dan kabupaten Bogor khususnya, serta warga masyarakat Jabodetabek pada umumnya.

Jika yang terpilih adalah opsi 2, yaitu Kota Bogor menjadi ibukota dari Provinsi Bogor Raya, maka pembentukan struktur pemerintahannya tidak sulit, karena tinggal meng-*copy-paste* struktur pemerintahan provinsi yang sudah ada sekarang, misalnya struktur pemerintahan Provinsi Banten yang paling dekat, yang juga merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari provinsi Jawa Barat. Tapi jika opsi 1 yang terpilih, yaitu menjadikan Bogor menjadi bagian yang terintegrasi dengan Daerah Khusus Jakarta – yang kelak sesudah tahun 2028 rencananya tidak lagi menjadi ibukota negara Republik Indonesia – dan wilayah-wilayah perkotaan serta kabupaten di sekitarnya, yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan yang saat ini merupakan wilayah Provinsi Banten, serta Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan sebagian wilayah Karawang, Sukabumi dan Cianjur yang selama ini merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Sedangkan wilayah Jakarta sendiri merupakan gabungan beberapa kota administratif. Dengan demikian harus dibentuk suatu struktur pemerintahan baru yang lebih besar daripada struktur pemerintahan provinsi, walau pun kepala daerahnya tetap dijabat oleh seorang Gubernur. Hanya saja sebutannya bukan lagi Gubernur/Kepala Daerah Provinsi, melainkan Gubernur/Kepala Daerah Megapolitan Jakarta Raya.

REFERENSI

- [1] **Utang Suwaryo, et.al.** , “*Sosiologi Pemerintahan*” , **Modul 1 – 9, IPEM4427**, Edisi 4, [November **2024**], Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta
- [2] **Rhiza S. Sadjad**, “*Desa Hilang, Kota Terbilang*”, RADAR BOGOR, 20 Desember 2024, hal. 3.
- [3] **Rizky Darmawan**, “*Asal Usul Nama dan Sejarah Kota Bogor, Kota Hujan yang Dibangun Thomas Stamford Raffles*” , <https://daerah.sindonews.com/read/1096185/701/asal-usul-nama-dan-sejarah-bogor-kota-hujan-yang-dibangun-thomas-stamford-raffles-1683885919> , di-akses tgl. 21 Oktober 2025, jam 16:23 WIB.
- [4] **Drajat Tri Kartono**, “*Sosiologi Perkotaan*”, **Modul 1 – 9, SOSI4308**, Edisi 4, [Agustus **2023**], Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta